

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Rozali, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdullah Rozali, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdullah, M. Ali, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Abdullah, Rozali H., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Aisyah Nur, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asshieddiqie Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Darwin Prinst, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fachrudin Ifan, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Jakarta: Alumni, 2004.
- Hasan, Z Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1974.
- Heriyanto Bambang, *Dwangsom Dalam Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Suatu Gagasan, 2004.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Lotulung, Paulus Efendi, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

- Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Mansoer, Mohammad Tolchah, Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Martitah, dkk, PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta: Kencana, 2017.
- NG Marshal, dkk, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018.
- Nurhadi, dkk, Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurmadjito, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Panjaitan, Budi Sastra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Medan: CV Manhaji, 2016.
- Prajudi Atmosudirdjo, Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara: Simposium PTUN, Bandung: Binacipta, 1997.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Samosir Djamanat, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2011
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Simanjuntak Enrico, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sipayung, JJ Paulus, Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN, Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Adnistrasi Negara*, Bandung: Alumni, 2001.

Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soepomo R, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Tjakra Negara Soegiatno, Hukum Acara Tata Usaha Negara di Indonesia, Jakarta: Seminar Grafika, 2004.

Wantu, M. Fence, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2014.

Wiyono R, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zein, Yahya Ahmad, dkk, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin TA 1990/1991.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

JURNAL

Admin, Jendela Informasi Hukum, “Teori Negara Hukum”, *Info Hukum*, Vol 20, No 4, 2019.

Berry Michael Frans, “Pembentukan Tori Peraturan Perundang-Undangan”, *Muhammadiyah Law Review*, Vol 2, No 2, 2018.

Dezonda Rosiana Pattipawae, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”, *Sasi : Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 25, No. 1, 2019.

Dinata, Ari Wirya, “Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 4, No 1, 2021.

Dwi S. Erna, Nabitatus Sa’adah, “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 1, 2021.

Hartati Ralang, Syafrida, “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata”, *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol 12, No 1, 2021.

Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1, No 3, (November 2012).

- Ivonne Pamfilia, “Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan Hipotek Terhadap Kapal Di Negara Indonesia dan Singapura”, *UIB Repository*, 2014.
- J, Firzhal Arzhi, Gatot Dwi Hendro W, “Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaanya”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 2, No 4, 2014.
- Justisia, “Perundang-undangan dan pranata social: Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No 1, 2021.
- Pamungkas Yogo, “Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Hukum Kenoktariatan*, Vol 3, No 2, 2020.
- Prasetyo Teguh, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*, (Oktober 2010).
- Putra Satria, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara”, *JUSTISI: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol 7, No 1, 2021.
- Putrijanti Aju, “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, *MMH: Fakultas Hukum Undip*, Jilid. 40, No 4, Oktober 2011.
- Rayhan Ahmad, Sakti Krisna Wijaya, dkk, “Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Peradaban Hukum*, Vol 1, No 1, 2023.
- Ridwan, dkk, “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum: IUS QUA IUSTUM*, Vol 25, No 2, 2018.
- Wahyudi Ari, “Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif”, *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, Vol 4, No 1, 2021.

Widianingrat I Gst Ngr Agung, I Putu Rasmadi Arsha P, “Upaya Hukum Bagi Tergugat Intervensi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Kertha Desa, Vol 9, No 4.

Yulius, “Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum di Indonesia” Jurnal Hukum Peratun, Vol 1, No 1, 2018.

SKRIPSI

Nurfajrin R, (2020), Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Alaudin Makassar. Makassar.